

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, N., Satibi, Suryawati, S., 2019. Evaluasi Pengelolaan Obat Pada Tahap Perencanaan dan Pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Akbar, N.H., Kartinah, N., Wijaya, C. 2016. Analisis Manajemen Penyimpanan Obat di Puskesmas Se-Kota Banjarbaru. Kalimantan Selatan: Universitas Lambung Mangkurat.
- Baku, Y., Satibi, Yasin, N.M., 2017. Evaluasi Perencanaan dan Distribusi Obat Program di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- [Bappenas RI] Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia. 2019. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan. *Penyediaan Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- [Depkes RI] Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1995. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1002/Menkes/SK/X/1995 Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 1995 Di 26 Daerah Tingkat II Percontohan Dalam Bidang Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- [Depkes RI] Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2002. Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, *Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD)*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- [Depkes RI] Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2002. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1426/Menkes/SK/XI/2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik Perbekalan Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- [Depkes RI] Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 189/Menkes/SK/III/2006 Tentang Kebijakan Obat Nasional (KONAS). Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- [Depkes RI] Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007. Direktorat Bina Obat dan Perbekalan Kesehatan, *Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Di Daerah*

Perbatasan. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

[Depkes RI] Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007. Direktorat Bina Obat dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. *Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Di Daerah Kepulauan*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

[Depkes RI] Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1121/Menkes/SK/XII/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

[Dinkes Surakarta] Dinas Kesehatan Kota Surakarta. 2018. Profil Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2018. Surakarta: Dinas Kesehatan Kota Surakarta.

Fradine, C. 2019. Evaluasi Pengelolaan Obat Di Upt Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta 2017. Surakarta: Universitas Setia Budi.

[Kemenkes RI & JICA] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia & Japan International Cooperation Agency. 2010. *Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian Di Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota*. Jakarta: Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

[Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2010. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan, *Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian Di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

[Kemenkes RI] Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2015. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal. *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

[Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2015. Direktorat Bina Obat dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. *Rencana Aksi*

Kegiatan Tahun 2015-2019. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. Sekretariat Jenderal *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. Sekretariat Jenderal *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Nasir, J.A., Satoto, K.I., Kridalukmana, R. 2013. Sistem Informasi Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Semarang: Universitas Diponegoro
- Nopiyansyah, Purba, A.V., Hidayat, W.U. 2016. Evaluasi Manajemen Pengadaan dan Distribusi Obat di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Periode Tahun 2016. Jakarta: Universitas Pancasila
- Oktaviani, N., Widodo, G.P., Kristanto, Y. 2017. Evaluasi Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB Tahun 2017. Surakarta: Universitas Setia Budi.
- Patatan, A., Satibi, Widodo, G.P. 2014. Evaluasi Pengelolaan Obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota M Di Era JKN. Surakarta: Universitas Setia Budi.

- Pondang, I.G., Sambou, C.N., Jabes W, Kanteri, Untu, S.D. 2019. Sistem Penyimpanan Obat Di UPTD Instalasi Farmasi Manado.
- Pramukantoro, G.E., Sunarti. 2015. Evaluasi Pengelolaan Obat Di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2015. Surakarta: Universitas Setia Budi.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengawasan Program Lintas Sektoral dalam Penyediaan dan Pemanfaatan Obat Publik. Jakarta: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.
- [Pemkot Surakarta] Pemerintah Kota Surakarta. 2016. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-J Tahun 2016 Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelayanan Teknis Pada Dinas Kesehatan. Pemerintah Kota Surakarta.
- [Perpres RI] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Sekretaris Republik Indonesia.
- Qiyaam, N., Furqoni, N., Hariati. 2016. Evaluasi Manajemen Penyimpanan Obat Di Gidang Obat Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umu Daerah Dr. R. Soedjono Selong, Lombok Timur. Lombok Timur: Muhammadiyah Mataram University.
- Quick, J.P., Rankin, L., R.O., O., R.W., 2012. *Managing Drug Supply, The Selection, Procurement, Distribution And Use Of Pharmaceutical*. Third Edition, Kumarin Press, Conecticus, USA.
- Rusli 2016. *Farmasi Rumah Sakit Dan Klinis*. Jakarta: Badan Pengembang Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Suryagama, D., Satibi, Sumarni. 2019. Analisis Perencanaan dan Ketersediaan Obat Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Supriani. 2018. Evaluasi Siklus Pengelolaan Obat Tentang Distribusi Obat Askes di IFRS RSUD Ajibarang Banyumas. Cilacap: Stikes Paguwarmas Maos, Penerbit: Wahana Riset Kesehatan.
- Tiarma, Gayatri Citraningtyas, Paulina Yamlean. 2017. Evaluasi Penyimpanan dan Pendistribusian Obat Di Instalasi Farmasi RSUD Noongan, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

- [UU RI] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 – 2025. Jakarta: Sekretaris Negara Republik
Indonesia.
- [UU RI] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretaris Republik Indonesia.
- [UU RI] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretaris Negara
Republik Indonesia.